

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam Pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di samping itu, bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Maka wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Selama ini telah dilakukan pemungutan pajak atas tanah (bumi) yang pelaksanaannya didasarkan pada berbagai undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sistem perpajakan yang berlaku sebelum adanya pembaruan di bidang pajak pada akhir tahun 1983, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan, telah menimbulkan tumpang tindih antara pajak yang satu dengan yang lainnya.

Dengan mengadakan pembaruan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi bermacam-macam pungutan atas tanah dan bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya, menyadarkan masyarakat

untuk melaksanakan kewajibannya serta memenuhi haknya di bidang perpajakan.

Realisasi tahap pertama dalam penyederhanaan sistem perpajakan yang berkaitan dengan pajak atas bumi dan bangunan adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai berlaku secara efektif sejak Januari 1985, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, namun hasil penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan objek pajak tersebut.

Penulis mengambil judul skripsi ini disebabkan karena objek penelitian ini yang terletak di Kantor Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang baru mengalami pemekaran wilayah Kecamatan khususnya di Kecamatan Ciledug. Sebelumnya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang berada di bawah wilayah Kecamatan Ciledug akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cepat khususnya di Karang Tengah maka mulai dari pertengahan tahun 2000 wilayah Kecamatan Ciledug di pecah menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

Di dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan, penulis selain mengadakan penelitian di Kantor Kecamatan Karang Tengah juga mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

penulis peroleh dari penelitian di Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Tangerang.

Pajak Bumi dan Banguna (PBB) salah satu jenis pajak yang potensial karena dari tahun ke tahun objeknya mengalami peningkatan baik dari jumlah maupun dari nilainya. Dengan meningkatnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber penerimaan daerah, maka sangatlah diperlukan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk berperan serta dalam usaha peningkatan penerimaan tersebut. Maka dari itu, penulis mengajukan judul : “ **ANALISIS PENERIMAAN SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP REALISASI ANGGARAN PADA WILAYAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG (STUDI KASUS PADA KANTOR KECAMATAN KARANG TENGAH)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2002-2005 dapat tercapai ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah target penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Karang Tengah yang di mulai dari tahun 2002-2005 dapat tercapai.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut.

Kegunaan penelitian :

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperdalam pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan nyata yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Karang Tengah di sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Bagi Wilayah Kecamatan yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak Kecamatan khususnya Kecamatan Karang Tengah.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan acuan lebih lanjut untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan.